



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan RPJMD yang telah tersusun tersebut diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah.

Penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2014 adalah bagian dari penggalan perjalanan rencana jangka menengah daerah. Berdasarkan sasaran di dalam RPJMD yang ingin dicapai pada tahun 2014, disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT yang telah disusun akan dijabarkan oleh satuan kerja yang terkait ke dalam rencana kerja SKPD (renja). Untuk operasionalisasi rencana kerja, maka oleh satuan kerja pelaksana disusun rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2014. RKT tersebut selanjutnya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan SKPD sebagai bahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014, maka pada tahun 2014



seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya.

LAKIP disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai, sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan segenap *stakeholder* Pemerintah Kabupaten dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2014 sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 sebanyak 33 sasaran dari 8 Misi. Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2014. Berdasarkan penilaian pencapaian sasaran tahun 2014 sebanyak 29 (87,88%) sasaran tercapai dengan katagori *sangat berhasil*, 2 (6,06%) sasaran tercapai dengan katagori *berhasil*, 1 (3,03%) sasaran tercapai dengan kategori *cukup* dan 1 (3,03%) sasaran tercapai dengan kategori *kurang*.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LAKIP tahun 2014 ini, diakui masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan seluruh jajaran SKPD berkomitmen akan melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, sehingga seluruh kinerja dapat tercapai dengan baik, yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Sidoarjo.

B. SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sangat mengharapkan adanya/



peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk :

1. Partisipasi *stakeholders*, antara lain : Perangkat Daerah (Dinas, Bagian, Lembaga Teknis, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.